

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah daerah di seluruh Indonesia, cenderung mengeluhkan timbul masalah sosial yang disebabkan oleh tingginya angka migrasi masuk ke daerah administratif mereka. Imigran menambah jumlah tanggungan pemerintah daerah, ketika mereka menetap untuk waktu yang panjang (Kars-Unluoglu et al., 2022). Keberadaan imigran yang menetap di waktu yang lama mengakibatkan munculnya konflik dengan penduduk pribumi. Sebagian masyarakat pribumi tentu tidak menyukai lahan atau lapangan pekerjaan di daerah mereka dikuasai oleh pendatang. Akibatnya ketimpangan sosial muncul, sehingga mempengaruhi stabilitas kehidupan sosial masyarakat di sebuah daerah (Dewi et al., 2019).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi ketiga di dunia, setelah Cina dan India. Jika diamati secara demografis pulau Jawa memiliki jumlah penduduk terpadat, dibandingkan pulau lainnya yang ada di Indonesia. Angka kelahiran yang tinggi dan imigran menjadi hal umum yang terjadi pada provinsi-provinsi di pulau Jawa (Atmani et al., 2021). Pada umumnya imigran yang memilih provinsi di Pulau Jawa sebagai alternatif tempat tinggal didorong oleh keinginan untuk mencari pekerjaan. atau disebabkan karena ikatan dinas, pendidikan dan sebagainya. Oleh sebab itu masyarakat yang bermigrasi dapat dikelompokkan atas beberapa kategori yaitu migrasi seumur hidup (*lifetime migration*), dan migrasi risen (*risen migration*).

Menurut Wang et al., (2019) risen migrasi merupakan sebuah fenomena yang unik yang dianggap juga ikut mempengaruhi konflik sosial di sejumlah provinsi di Indonesia terutama di Pulau Jawa, keberadaan mereka membuat lapangan pekerjaan semakin terbatas, dan mengakibatkan tingginya pengangguran di daerah yang menjadi tujuan migrasi. Bah et al., (2023) mengungkapkan risen migrasi memiliki rentang waktu minimal 6 bulan. Berdasarkan data yang peneliti peroleh data Statistik Migrasi Indonesia diketahui perkembangan Risen Migrasi di Pulau Jawa seperti terlihat pada Tabel 1 di bawah ini:

**Table 1 Perkembangan Risen Migrasi Masuk Ke Pulau Jawa Tahun 2016 – 2022**

Provinsi	Tahun (Orang)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DKI Jakarta	455.728	484.154	455.350	477.389	497.392	503.532	505.351
Jawa Barat	692.311	1.011.000	902.840	920.897	937.381	985.634	998.320
Jawa Tengah	485.797	665.562	688.255	703.052	716.973	802.432	815.386
DI Yogyakarta	204.065	217.726	232.563	249.819	265.708	301.643	315.641
Jawa Timur	349.622	447.082	494.560	500.594	506.501	523.543	545.380
Banten	289.981	276.566	290.453	298.121	303.875	327.432	337.540

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional (2022)

Pada Tabel 1 terlihat terjadi peningkatan jumlah risen migrasi pada enam provinsi di Pulau Jawa. Jika diamati dari tahun 2016 sampai dengan 2022 terlihat Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah risen migrasi terbanyak, namun walaupun provinsi lain tidak sebanyak Jawa Barat. Risen migrasi tentu menyebabkan banyaknya masalah sosial yang menjadi beban pemerintah daerah. Oleh sebab itu sangat penting bagi peneliti untuk mencoba mengamati sejumlah faktor pemicu yang dapat mempengaruhi masyarakat melakukan risen migrasi masuk ke sejumlah provinsi di Pulau Jawa.

Menurut Suharto et al., (2016) risen migrasi masuk ke sebuah provinsi tentu memiliki sejumlah penyebab atau didorong oleh sejumlah faktor diantaranya adalah indeks pembangunan manusia, kelengkapan fasilitas umum di sebuah daerah, dan kondisi disparitas pendapatan di sebuah daerah. Hal yang hampir sama juga diungkapkan oleh Rachmad (2018) menyatakan bahwa faktor ekonomi berperan penting untuk mempengaruhi terjadinya risen migrasi. Ketika daerah asal memiliki tingkat disparitas pendapatan yang tinggi, maka besar kemungkinan risen migrasi ke daerah lain yang lebih memiliki stabilitas ekonomi yang lebih baik akan muncul.

Menurut Syaifullah dan Malik (2017) indeks pembangunan manusia merupakan nilai indeks yang menunjukkan seberapa baik standar kualitas hidup masyarakat di sebuah daerah yang diamati dari layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan umum lainnya. Semakin tinggi nilai indeks mengisyaratkan semakin baik kualitas suatu kelompok masyarakat. Risen migrasi masuk ke sebuah daerah tentu didorong oleh harapan adanya perbaikan standar kehidupan. Dengan mengamati kualitas hidup di sebuah daerah, perpindahan sementara di pastikan akan terjadi, mengingat setiap kepala keluarga ingin hidup layak dan berkualitas.

Sesuai dengan data yang peneliti peroleh dari Badan Pusat Statistik Nasional diketahui perkembangan Indeks Pembangunan Manusia provinsi-provinsi di Pulau Jawa terlihat pada Tabel 2 di bawah ini:

**Table 2 Perkembangan IPM Provinsi Pulau Jawa Tahun 2016 – 2022**

Provinsi	IPM (Satuan Indeks)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DKI Jakarta	79.60	80.06	80.47	80.76	80.77	81.11	81.65
Jawa Barat	70.05	70.69	71.30	72.03	72.09	72.45	73.12
Jawa Tengah	69.98	70.52	71.12	71.73	71.87	72.16	72.79
DI Yogyakarta	78.38	78.89	79.53	79.99	79.97	80.22	80.64
Jawa Timur	69.74	70.27	70.77	71.50	71.71	72.14	72.75
Banten	70.96	71.42	71.95	72.44	72.45	72.72	73.32

*Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional (2022)*

Pada Tabel 2 terlihat nilai Indeks Pembangunan Manusia di enam provinsi di Pulau Jawa menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan 2022 yang lalu. Kondisi tersebut menunjukkan kualitas hidup masyarakat di enam provinsi di Pulau Jawa cenderung meningkat, walaupun sempat terjadi pandemi, sehingga sangat wajar bagi kepala keluarga yang berasal dari provinsi di Pulau Jawa, menjadi kota-kota di enam provinsi tersebut sebagai tujuan migrasi khususnya migrasi sementara (*risen migration*).

Hasil penelitian Latifadina (2013) menemukan indeks pembangunan manusia yang dimiliki sebuah daerah berpengaruh positif terhadap risen migrasi. Temuan yang konsisten juga diperoleh oleh Atmani et al., (2021) menyatakan motif terjadinya risen migrasi ke sebuah provinsi adalah ingin mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan dengan kehidupan yang dijalankan oleh sebuah keluarga di daerah asal. Dimana indikator tersebut dapat diamati dari Indeks Pembangunan Manusia. Selanjutnya hasil penelitian yang konsisten juga diperoleh oleh Rachmad (2018) yang menemukan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap risen migrasi ke Pulau Kalimantan.

Todaro (2006) mengungkapkan setiap manusia ingin mendapatkan kehidupan layak, salah satu acuan yang menjadi ukuran layak kualitas hidup

manusia adalah pendapatan. Pada umumnya masyarakat menjadikan standar Upah Minimum Provinsi sebagai patokan yang dapat mendorong meningkatnya kualitas kehidupan, akibatnya banyak masyarakat diluar pulau Jawa menjadikan provinsi-provinsi di pulau tersebut menjadi tujuan migrasi, khususnya risen migrasi. Semakin tinggi upah minimum provinsi pada sejumlah provinsi di Pulau Jawa, tentu akan menjadi daya tarik bagi masyarakat tertentu untuk mencoba pindah ke pulau tersebut, dengan tujuan motif ekonomi yaitu meningkatkan standar kualitas hidup.

Upah minimum provinsi menjadi salah satu acuan imigran untuk berpindah ke sebuah provinsi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional diketahui perkembangan Upah Minimum Provinsi enam provinsi di Pulau Jawa terlihat pada Tabel 3 di bawah ini:

**Table 3 Perkembangan Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2016 – 2022**

Provinsi	Upah Minimum Provinsi (Dalam Rupiah)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DKI Jakarta	2.700.000	3.120.500	3.648.036	3.940.973	4.276.350	4.550.700	5.050.000
Jawa Barat	1.000.000	1.250.00	1.544.361	1.668.373	1.810.351	2.250.000	2.750.000
Jawa Tengah	910.000	1.050.000	1.486.065	1.605.396	1.742.015	2.050.700	2.550.700
DI Yogyakarta	988.500	1.125.500	1.454.154	1.570.923	1.704.608	2.125.750	2.625.500
Jawa Timur	1.000.000	1.250.000	1.508.895	1.630.059	1.768.777	2.125.800	2.750.400
Banten	1.600.000	1.750.500	2.099.385	2.267.990	2.460.997	2.750.800	3.250.500

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional (2022)

Pada tabel diatas terlihat DKI Jakarta memiliki nilai Upah Minimum Provinsi tertinggi dari tahun 2016 sampai dengan 2022. Dari data menunjukan nilai Upah Minimum Provinsi Kota Jakarta menjadi hal yang menarik bagi para imigran, sehingga wajar pulau Jawa memiliki jumlah risen migrasi terbanyak di bandingkan provinsi yang ada di pulau lain di Indonesia.

Hasil penelitian Atmani et al., (2021) menemukan upah minimum provinsi berpengaruh positif terhadap risen migrasi. Ketika upah minimum provinsi daerah tujuan migrasi lebih baik dari daerah asal, maka akan semakin tinggi motivasi masyarakat untuk kepala keluarga melakukan risen migrasi. Temuan yang sama juga diperoleh oleh Suharto, (2018) menemukan upah minimum provinsi berpengaruh positif terhadap risen migrasi. Selanjutnya hasil penelitian yang sama juga diperoleh oleh Santoso (2018) menyatakan upah minimum provinsi yang semakin tinggi akan menjadi alasan terjadinya perpindahan sementara ke sebuah provinsi.

Menurut Andias (2014) ketimpangan pendapatan yang terjadi akibat tingginya persaingan untuk mendapatkan lahan pekerjaan yang layak menjadi motif terjadinya risen migrasi pada sebuah daerah. Ketika disparitas pendapatan tinggi, tentu terdapat ruang pemisah yang nyata antara masyarakat miskin dengan yang kaya, akibatnya konflik akan terjadi, serta mengakibatkan kenyamanan dan kesejahteraan hidup akan dirasakan. Fenomena tersebut mendorong masyarakat yang belum memiliki nilai pendapatan yang memuaskan untuk mencari atau pindah ke daerah lain yang dianggap dapat memberikan peruntungan yang lebih baik.

Perubahan disparitas pendapatan yang terjadi di sebuah provinsi dapat diamati dari Gini Indeks. Berdasarkan hasil identifikasi data yang telah dilakukan diketahui perkembangan gini indeks pada enam provinsi di Pulau Jawa seperti terlihat pada Tabel 4 di bawah ini:

**Table 4 Perkembangan Indeks Gini Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2016 – 2022**

Provinsi	Indeks Gini (Dalam Indeks)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DKI Jakarta	0.411	0.409	0.390	0.391	0.400	0.413	0.421
Jawa Barat	0.417	0.393	0.405	0.398	0.398	0.410	0.412
Jawa Tengah	0.393	0.365	0.357	0.358	0.359	0.365	0.371
DI Yogyakarta	0.443	0.440	0.422	0.428	0.437	0.437	0.438
Jawa Timur	0.379	0.415	0.371	0.364	0.364	0.365	0.369
Banten	0.365	0.379	0.367	0.361	0.365	0.371	0.378

*Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional (2023)*

Pada tabel 4 terlihat indeks gini masing masing provinsi di Pulau Jawa relatif berbeda beda, jika diamati dari data DKI Jakarta dan DI Yogyakarta menjadi provinsi dengan peningkatan indeks gini tertinggi. Kondisi mengisyaratkan tingkat ketimpangan pendapatan di provinsi tersebut relatif tinggi. Jika para migran masuk ke masing-masing provinsi semakin tinggi tentu akan meningkatkan masalah sosial, sehingga mendorong peneliti untuk memilih disparitas pendapatan sebagai variabel yang mempengaruhi risen migrasi masuk di pulau Jawa.

Hasil penelitian Atmani et al., (2021) menemukan disparitas pendapatan berpengaruh positif terhadap risen migrasi di Indonesia. Konsistensi hasil penelitian juga diperoleh oleh Andias (2014) mengungkapkan ketika daerah asal imigran memiliki disparitas pendapatan yang tinggi maka, kemungkinan terjadinya risen migrasi dengan motif mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak akan meningkat. Selanjutnya hasil penelitian yang sama juga diperoleh oleh Dewi et al., (2019) menyatakan disparitas pendapatan yang tinggi di sebuah

daerah akan memicu masyarakat pribumi untuk melakukan migrasi yang bersifat sementara (risen).

Terjadinya perpindahan masyarakat ke sebuah daerah untuk sementara juga dipengaruhi oleh kelengkapan fasilitas umum di sebuah daerah (Suharto, 2018). Ketika masyarakat menyadari bahwa fasilitas umum di daerah asal mereka tidak lengkap, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan atau pun layanan umum lainnya, maka kebutuhan untuk mendapatkan layanan fasilitas tersebut akan mendorong mereka untuk meninggalkan daerah asal dan pindah untuk sementara waktu ke daerah yang memiliki fasilitas umum yang lebih baik dan lengkap. Hal tersebut terlihat dari banyaknya anak muda usia sekolah yang menyeberang ke Pulau Jawa untuk melanjutkan studi, atau banyak masyarakat di Sumatera yang lebih percaya untuk mendapatkan layanan kesehatan pada rumah sakit di Ibu Kota Jakarta.

Hasil penelitian Wibisono (2020) menemukan fasilitas umum di daerah asal yang kurang lengkap dan memadai mendorong terjadinya risen migrasi ke daerah lain. Temuan penelitian yang konsisten juga diperoleh oleh Ramadhany, (2019) yang menyatakan semakin lengkap layanan umum di sebuah daerah maka akan menurunkan kecenderungan terjadinya migrasi baik bersifat seumur hidup atau pun sementara. Selanjutnya hasil penelitian Atmani et al., (2021) menemukan fasilitas umum yang kurang memadai di daerah asal akan memicu terjadinya migrasi sementara di sebuah daerah.

Sesuai dengan uraian fenomena dan sejumlah hasil penelitian terdahulu, peneliti merasa penting untuk mencoba kembali menganalisis dan membuktikan pengaruh sejumlah faktor yang memicu terjadinya risen migrasi masuk ke Pulau Jawa, dimana pulau tersebut telah terjadi penumpukan penduduk yang sangat



besar, dan berdampak pada banyaknya masalah sosial yang terjadi pada sejumlah provinsi di Pulau Jawa. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang berjudul: **Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Provinsi, Disparitas Pendapatan, dan Fasilitas Umum Terhadap Risen Migrasi di Pulau Jawa**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka dalam penelitian ini permasalahan yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap risen migrasi di pulau Jawa ?
2. Bagaimanakah pengaruh upah minimum provinsi terhadap risen migrasi di pulau Jawa ?
3. Bagaimanakah pengaruh disparitas pendapatan terhadap risen migrasi di pulau Jawa ?
4. Bagaimanakah pengaruh fasilitas pendidikan terhadap risen migrasi di pulau Jawa ?
5. Bagaimanakah pengaruh fasilitas kesehatan terhadap risen migrasi di pulau Jawa ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan uraian rumusan masalah, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Membuktikan dan menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap risen migrasi di Pulau Jawa.
2. Membuktikan dan menganalisis pengaruh upah minimum provinsi terhadap risen migrasi di Pulau Jawa.
3. Membuktikan dan menganalisis pengaruh indeks disparitas pendapatan terhadap risen migrasi di Pulau Jawa.
4. Membuktikan dan menganalisis pengaruh fasilitas pendidikan terhadap risen migrasi di Pulau Jawa.
5. Membuktikan dan menganalisis pengaruh fasilitas kesehatan terhadap risen migrasi di Pulau Jawa.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan kepada uraian rumusan masalah dan tujuan penelitian, diharapkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

1. Peneliti

Penelitian ini merupakan syarat utama bagi peneliti untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di bidang ilmu ekonomi pembangunan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bung Hatta Padang.

2. Praktisi

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah, dimana hasil yang diperoleh dapat dijadikan sebagai

acuan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan demografis khususnya migrasi sementara (*risen migration*) pada sejumlah provinsi di Pulau Sumtera.

### 3. Akademisi

Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dijadikan acuan atau referensi bagi peneliti dimasa mendatang. Selain itu dengan mengamati keterbatasan penelitian yang disampaikan peneliti juga dapat mendorong adanya modifikasi penelitian oleh peneliti dimasa mendatang, sehingga mendorong hasil penelitian yang lebih baik dan sempurna.